

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Pulau Taliabu

Irman Mamulati ^{1✉}, Muhammad Iqra Harun ¹ dan Ani Maharani Teapon ²

¹ Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia

² Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia

E-mail : irmanmamulaty@gmail.com

Info Artikel :	<input checked="" type="checkbox"/> Artikel Penelitian	<input type="checkbox"/> Artikel Pengabdian	<input type="checkbox"/> Riview Artikel
Diterima : 28 Nov. 2022, Disetujui : 30 Nov. 2022, Publikasi On-Line : 30 Nov. 2022			

Vol.	No.
2	2
Hal 16 - 22	

✉ **Koresponden Author :**

Irman Mamulati

E-mail :

irmanmamulaty@gmail.com

Universitas Muhammadiyah

Maluku Utara

Ternate, Indonesia



Copyright©

2022. Irman Mamulati,
Muhammad Iqra Harun, Ani
Maharani Teapon

Abstrak.

Pemerintah daerah yang mampu menerapkan standar akuntansi secara penuh dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah, tentu tidak mengalami kesulitan dalam penyajian laporan keuangan. Karena salah satu unsur laporan keuangan yang berkualitas adalah telah menerapkan standar akuntansi dalam setiap transaksi dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh standar akuntansi pemerintah (X^1) dan penerapan sistem informasi keuangan daerah (X^2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Sebanyak 20 OPD dijadikan Obyek penelitian dan sampel penelitian yaitu total 80 Orang ASN Kabupaten Pulau Taliabu. Metode analisis data menggunakan regresi berganda dengan alat SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial standar akuntansi pemerintah (X^1) dan penerapan sistem informasi keuangan daerah (X^2) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Sementara simultan standar akuntansi pemerintah (X^1) dan penerapan sistem informasi keuangan daerah (X^2) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

Keyword : Penerapan SAP, SIAKAD, Kualitas laporan Keuangan, Kabupaten Pulau Taliabu

I. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang di atur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bentuk bersifat seluruh pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintah daerah terdapat dua subsistem akuntansi, yaitu satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dan organisasi perangkat daerah (OPD). Laporan keuangan OPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan OPD, oleh karena itu setiap OPD harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin. Untuk dapat membuat laporan keuangan yang baik dan bertanggung jawab pemerintah perlu menerapkan akuntansi berbasis akrual. Penerapan standar akuntansi pemerintah juga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Instansi pemerintah mulai tahun 2015 harus menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yaitu berbasis akrual.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) laporan keuangan pokok menurut standar akuntansi pemerintahan adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penerapan standar akuntansi pemerintah mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan struktur pada satu periode pelaporan kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui

penerapan standar akuntansi pemerintah akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful*. Kegunaan laporan keuangan di tentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus di susun berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. Namun, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual belum sepenuhnya efektif.

Fakhrurazi (2010) menyatakan dengan adanya standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang akurat, relevan dan dapat dibandingkan bagi *stakeholders*. Dengan adanya standar akuntansi pemerintahan, pemerintah dapat menyajikan dan menerapkan standar akuntansi pemerintah sebagai pedoman dan penyusunan laporan keuangan daerah dalam mewujudkan satu tata pemerintahan yang bergelar *good governance*. Dengan demikian standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain Standar Akuntansi Pemerintahan, penerapan sistem akuntansi juga sangat penting dalam kualitas laporan keuangan. Dimana penerapan sistem akuntansi yang baik tentunya secara konsep dapat berperan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Pemerintah daerah adalah lembaga yang menjalankan roda di pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah adalah pihak yang menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dituntut agar menjalankan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan. Upaya pemerintah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan cara penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang mengikuti standar akuntansi pemerintah (Atika, dkk; 2019)

Dalam konteks pemerintah daerah, peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Terkait pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), disebutkan bahwa laporan keuangan penyusunan laporan keuangan terutama pada tingkat OPD. Dalam menyampaikan laporan realisasi anggaran, OPD mengacu pada laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya kepada OPD setiap bulannya, laporan tersebut yang menjadi dasar OPD untuk menyusun laporan realisasi anggaran berkala (triwulan dan semester). Permasalahan yang sering kali terjadi adalah masih terdapat koreksi atas laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara yang menyebabkan pergeseran realisasi pendapatan dan belanja, sehingga kevalidan data laporan realisasi anggaran berskala OPD menjadi tidak akurat (Basukianto dan Febrin, 2015)

Dinamika yang terjadi dimana hasil evaluasi BPK menunjukkan bahwa dari beberapa Kabupaten di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019 BPK RI Perwakilan Maluku Utara telah merilis Kabupaten Pulau Taliabu adalah satu-satunya daerah yang menerima predikat buruk. Tidak sampai disitu pada tahun 2020 juga 10 kabupaten kota di provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Taliabu kembali menerima penghargaan laporan keuangan terburuk. Sebelumnya Tahun 2019 lalu, BPK telah menyatakan tidak bisa menelusuri penerimaan dan pengeluaran yang belum dapat dijelaskan asal uang serta substansi penggunaannya anggaran 58.314.599.935,45 di lingkungan Pemkab setempat. BPK menyatakan fakta predikat *disclaimer* bukan hanya persoalan administrasi, melainkan oleh BPK bahwa ada temuan bocornya anggaran Rp. 58 miliar yang diduga keluar dari kas daerah tanpa SP2D (BPK Perwakilan Maluku Utara).

Berbagai hasil penelitian tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Patra, dkk (2015); Yuliani dan Agustin (2016); Irwansyah, dkk (2019); serta oleh Suprihatin dan Ananthy (2019) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu?
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu?
3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu?

II. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Dimana jenis penelitian kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014:14).

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pulau Taliabu. Sementara waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari-April 2022.

2.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik angket (kuesioner). Penelitian ini memberikan kuesioner secara langsung kepada 80 responden yang bekerja di OPD Kabupaten Pulau Taliabu. kemudian jawaban dari responden diambil kembali dan dimana penelitian ini memperoleh kembali kuesioner sebanyak 80 kuesioner yaitu sebanyak 100%.

2.4. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Pulau Taliabu yang berjumlah 20 (Dua Puluh). Sedangkan sampel yang dijadikan obyek penelitian sebanyak 80 orang, dimana terdiri dari: 1) Kepala Dinas, 2) Kepala Bidang Keuangan, 3) Kepala Bidang Akuntansi dan 4) Bendahara.

2.5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menguji data hipotesis. Metode analisis data menggunakan regresi berganda dengan alat analisi yaitu SPSS versi 20.

2.6. Pengujian Hipotesis

2.6.1. Uji T.

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig. < 0.05$ maka ada pengaruh secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig. > 0.05$ maka tidak ada pengaruh secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen.

2.6.2. Uji F

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama – sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan $F < 0.05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2016). Adapun ketentuan dari uji F yaitu jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya semua variabel independen/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat. Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 Artinya, semua variabel independen/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

2.6.3. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Sujarweni (2015:164) bahwa Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui prosentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Jika R^2 semakin besar, maka prosentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin tinggi. Jika R^2 semakin kecil, maka, prosentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin rendah.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Analisis Regresi Berganda

Tujuan analisis regresi berganda untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun hasilnya pada Tabel 1.

Table 1. Analisis regresi berganda

Model	Unstandardi zed Coefficients		Standardizet Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error			
(Constanta)	39.270	3.799		10.337	000
Standar Akuntansi Pemerintah	312	086	390	2.689	000
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	327	090	407	3.627	000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Data Sekunder diolah Peneliti 2022

$$\text{Kualitas Laporan Keuangan} = 39.270 + 312 \text{ SAP} + 327 \text{ SAKD} + 3.799$$

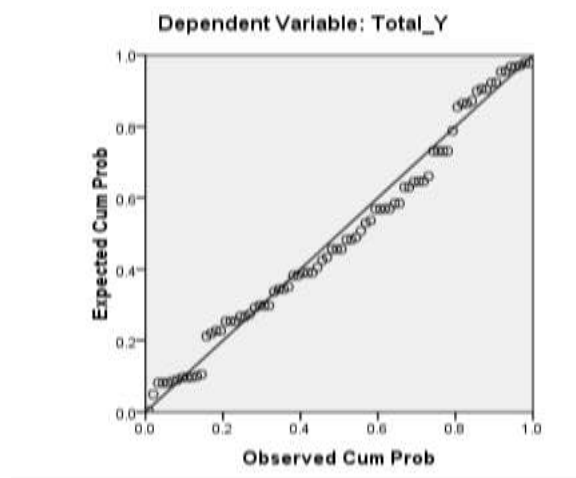
Nilai konstanta sebesar 39.270 menunjukkan bahwa nilai ini menunjukkan bahwa nilai konstanta pengaruh positif. Hal tersebut jika standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sebesar 0 maka kualitas laporan keuangan sebesar 39.270. standar akuntansi pemerintah sebesar 312 dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 327.

3.1.2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk melihat apakah variabel baik independen maupun dependen berdistribusi normal atau tidak. Adapun dapat dilihat pada Normal P-Plot pada Gambar 1.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 1. Uji normalitas

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa *plotting* (titik-titik) menyebar disekitar garis-garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah aris diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa yang diolah berdistribusi normal yang artinya uji normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau bebas. Adapun dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil uji multikolinieritas

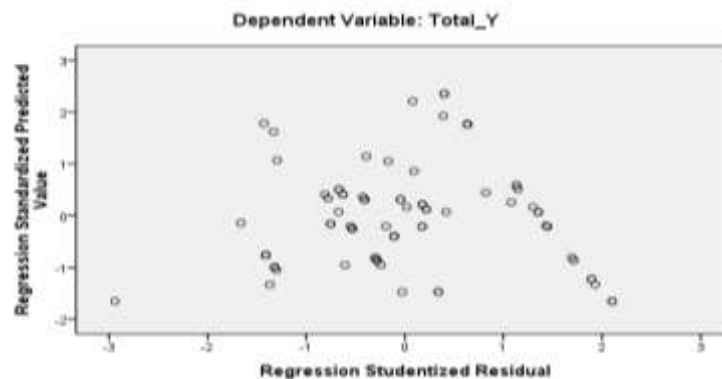
Model	Tolerance	VIF
Standar Akuntansi Pemerintah	0,877	1,140
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	0,877	1,140

Sumber: Data Primer diolah Peneliti 2022

Nilai toleransi kedua variabel yaitu: standar akuntansi pemerintah $0.877 > 0,100$ dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah $0.877 > 0,100$. Sementara nilai VIF yaitu: standar akuntansi pemerintah $1,140 < 10$ dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah $1,140 < 10$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan Variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Adapun dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Uji heteroskedestitas

Dari Gambar 2, dapat terlihat bahwa titik-titik membentuk pola yang jelas dan terlihat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. jadi dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

3.1.3. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t-test)

Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Adapun hasil uji tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji parsial

Model	Unstandarized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constanta)	39.270	3.799		10.337	.000
Standar Akuntansi Pemerintah	.312	.086	.390	2.689	.000
Sistem informasi Akuntansi Keuangan Daerah	.327	.090	.407	3.627	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Data Primer diolah Peneliti 2022

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memperoleh signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ dan t-hitung $2,689 > t$ -tabel $1,683$ sehingga H_0 diterima. Dengan demikian standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- b. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah memperoleh signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ dan t-hitung $3,627 > t$ -tabel $1,683$ sehingga H_0 diterima. Dengan demikian sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Uji Simultas (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji simultan uji f

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	414.710	2	207.355	6.677	.000 ^a
	Residual	2391.240	77	31.055		
	Total	2805.950	79			

Sumber: Data Primer diolah Peneliti 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai signifikan untuk standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara simultan memperoleh signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $6,677 > 0,05$. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

c. Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi untuk mengetahui tentang seberapa besar variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Koefisien determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.384 ^a	.748	.126	5.573

Sumber: Data Primer diolah Peneliti 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai adjusted R square sebesar 0,126 hal ini menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan 12,6% variasi variabel dependen. Sementara sisanya sebesar 87,4% dijelaskan oleh variabel independen. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,384 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 38,4%.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Pengaruh standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan

Dari hasil pengujian SPSS uji parsial (t) menunjukkan bahwa hipotesis H_1 dengan nilai signifikan untuk pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan sebesar $0,000 < 0,05$ dan t-hitung $2,689 > t$ -tabel 1,683. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Yang artinya H_1 diterima. Dengan demikian dapat dikatakan ketika pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu telah melakukan penerapan standar akuntansi, maka laporan keuangan menjadi berkualitas.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (pemerintah, 2014). Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah adalah pedoman wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka tercapainya transparansi dan akuntabilitas.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Lasoma (2018); Patra, dkk (2015); Yuliani dan Agustin (2016); Irwansyah, dkk (2019); serta oleh Suprihatin dan Ananthi (2019) menyatakan bahwa variabel standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin baik dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah, maka secara otomatis laporan keuangan yang disajikan juga berkualitas.

3.2.2. Pengaruh sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan

Dari hasil pengujian uji parsial (t) menunjukkan bahwa hipotesis H_2 dengan nilai signifikan untuk pengaruh sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan sebesar $0,000 < 0,05$ dan t-hitung $3,627 > t$ -tabel 1,683. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian dapat dikatakan ketika pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu telah memiliki sistem informasi akuntansi keuangan daerah, maka laporan keuangan menjadi berkualitas.

Sistem akuntansi keuangan daerah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah, menurut peraturan menteri dalam negeri Nomor 64 tahun 2013 tersebut, sistem akuntansi pemerintah atau sistem akuntansi keuangan daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan akuntansi pemerintah

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi, untuk memperoleh kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah harus melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Patra, dkk (2015); Yuliani dan Agustin (2016); Irwansyah, dkk (2019); serta oleh Suprihatin dan Ananthi (2019) menyatakan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara parsial variabel standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.
2. Secara parsial variabel sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.
3. Secara simultan atau bersama-sama variabel standar akuntansi pemerintah dan variabel sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.

DAFTAR PUSTAKA

- Atika, D. Listya, D dan Allia I.** 2019. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengalaman Kerja Serta Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Medan. *Jurnal Warta Edisi*: 62. 1829-7463.
- Basukianto, C. P dan Febrian.** 2015 *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)*. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE) Vol.22, No. 2.* 1412-3126.
- Fakhrurazi.** 2010. Standar Akuntansi Pemerintah: <http://fakhrurazy.wordpress.com>.
- Ghozali, I.** 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25 (9th ed)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Irwansyah, F. Dwi R. Indra S.** 2019. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman.* Vol 4, No 2
- Lasoma, V. A.** 2013. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Akuntansi Vol 2. No 1*
- Patra, A, D, A. Lanteng, B. dan Hasriani.** 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi.* Vol. 02 No. 01.
- Peraturan Pemerintah No. 24** Tahun 2005 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71** Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*
- Suprihatin, N.S dan Ananthi, A, A.** 2019. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu.* Vol.12 No.2.
- Sugiyono.** 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna.** 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yuliani, N.L. dan Agustini, R.D.** 2016. Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis & Ekonomi*, Volume 14, Nomor 1, April.